

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016-2019**

Muhammad Naswandi, Firmansyah Kusasi, Muhammad Idris

Email : Muhammadnaswandi97@gmail.com

Program studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Implementation in the Regional Government especially in particular Regional Organizations (OPD) needs to pay attention to the management of resources (funds) properly, in this case the budgeting that is done and planned must be considered good and right, so that the achievement of effectiveness and efficiency can be carried out as is expected. The purpose of this study is to analyze the effectiveness and efficiency of the implementation of the expenditure budget at the Regional Research and Development Planning Board of Bintan Regency, for the 2016-2019 budget period. The analytical method used in this study is in the form of calculating the level of effectiveness and level of efficiency of the budget. This type of research is quantitative descriptive analysis. The results showed that the effectiveness ratio with an average percentage of 89.11% was quite effective, the efficiency ratio with an average percentage of 84.24% was less efficient.

Keywords: *Budget Implementation, Effectiveness, Efficiency.*

I. Pendahuluan

Keuangan daerah yang dinyatakan dalam bentuk anggaran merupakan suatu rencana operasional keuangan daerah, dimana di satu sisi menggambarkan penerimaan pendapatan daerah, dan di lain sisi menggambarkan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran. Diantara kedua sisi anggaran tersebut, sisi pengeluaran cenderung menjadi pusat perhatian publik karena terkait dengan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Efektivitas dan Efisiensi sangat penting dalam pengukuran atau perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan serta terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai.

Bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Daerah Kabupaten Bintan, menjadi unsur perencanaan penyelenggara Pemerintahan Daerah yang juga mempunyai tugas membantu Kepala Daerah terkait yaitu Bupati dan dalam pengawasan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui internalnya oleh Inspektorat serta memiliki wilayah kerja seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Dalam melaksanakan tugas dalam bidang perencanaan pembangunan, Bapelitbang sendiri mempunyai peran penting yaitu melakukan analisis terhadap perencanaan, penelitian dan pengembangan kabupaten bintan yang akan bermuara pada anggaran dan belanja daerah sehingga pengelolaannya dapat terlaksana dengan efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan lima tahunan yaitu RPJMD dan dokumen perencanaan satu tahunan yaitu RKPD. Dari RKPD terkait disusunlah KUA-PPAS yang ada dibahas dengan DPRD selanjutnya menjadi RKA pada masing-masing Perangkat Daerah. Dari

RKA tersebut disusunlah RAPBD oleh Pemerintah Daerah, setelah dibahas dengan DPRD dan evaluasi dari Provinsi ditetapkan menjadi APBD.

Diketahui bahwa dapat dijelaskan bahwa tiap tahun penggunaan anggaran pada OPD khususnya Bapelitbang Kabupaten Bintan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dalam hal ini perubahan dan pertumbuhan dari anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam menilai kinerja keuangan yang ada pada OPD.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis ingin mengetahui pelaksanaan anggaran belanja di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi dengan demikian penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Kabupaten Bintan Tahun 2016-2019”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Kabupaten Bintan Tahun 2016-2019
2. Bagaimana efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan daerah (Bapelitbang) kabupaten bintan tahun 2016-2019

1.3 Tinjauan Teori

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan (Adisasmita, 2014:33). Menurut Perpres No. 29 Tahun 2014, pengukuran kinerja anggaran merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja.

Mahmudi (2015: 6) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan.

B. Tujuan Pengukuran Kinerja

Untuk menilai suatu kinerja maka dilakukan dengan pengukuran kinerja, untuk menilai sukses tidaknya suatu organisasi, program atau kegiatan. Dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Pengukuran kinerja merupakan instrument yang digunakan untuk menilai hasil akhir pelaksanaan kegiatan terhadap target dan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Mahmudi (2015: 14) menjelaskan bahwa tujuan dilakukan penilaian kinerja disektor publik adalah:

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan dari arah yang mestinya. pemimpin dengan cepat dapat melakukan tindakan koreksi dan perbaikan.

2. Menyiapkan sarana pembelajaran pegawai
Pengukuran kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran pegawai tentang bagaimana seharusnya mereka berlandaskan, dan memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, skill, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik. Hanya dengan pengukuran kinerja seseorang dapat diketahui bahwa ia telah bekerja dengan baik atau tidak.
3. Memperbaiki kinerja periode berikutnya
Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk budaya berprestasi didalam organisasi. Kinerja saat ini harus lebih baik dari kinerja sebelumnya, dan kinerja yang akan datang harus lebih baik dari pada sekarang.
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment
Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematis bagi manajer untuk memberikan reward, misalnya kenaikan gaji, tunjangan, dan promosi, atau punishment misalnya pemutusan kerja, penundaan promosi, dan teguran.
5. Memotivasi Pegawai
Dengan adanya pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh reward. Reward tersebut memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi dengan harapan kinerja yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang tinggi.
6. Menciptakan akuntabilitas publik
Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja yang dipublikasikan bagi pihak internal maupun eksternal.

C. Efektivitas

Mahmudi (2015: 86) menjelaskan bahwa efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan (target) dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Hasil atau target yang diharapkan merupakan outcome sedangkan hasil yang dicapai merupakan output. Efektivitas membandingkan antara outcome dengan output suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dengan kata lain anggaran digunakan secara tepat (*spending wisely*) dalam (Mahmudi, 2018: 22).

Menurut Ulum (2012:28), efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Sedarmayanti (2012:67) mendefinisikan efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai.

Mardiasmo (2012:132) mendefinisikan efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna), yaitu hubungan antara keluaran dengan tujuan yang harus dicapai.

Adisasmita (2014:170) mendefinisikan efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan disertai dengan tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

D. Efisiensi

Adisasmita (2014:169) menjelaskan efisiensi dapat dikatakan suatu kondisi atau keadaan dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki. Mardiasmo (2012:132) mengemukakan efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas yang menunjukkan kehematan baik dari segi waktu, tenaga dan biaya.

Efisiensi merupakan hubungan antara output berupa barang atau jasa yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input. Konsep efisiensi hampir sama dengan produktivitas suatu organisasi program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output sebesar-besarnya. Efisiensi berarti pembelanjaan anggaran secara cermat (*spending well*) dalam (Mahmudi, 2018: 21).

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah hubungan antara barang dan *ja.sa (output)* yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumberdaya (*input*) yang digunakan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya dengan percuma dan dengan biaya yang serendah-rendahnya.

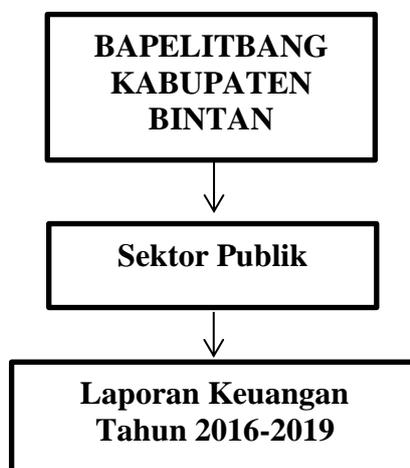
E. Anggaran

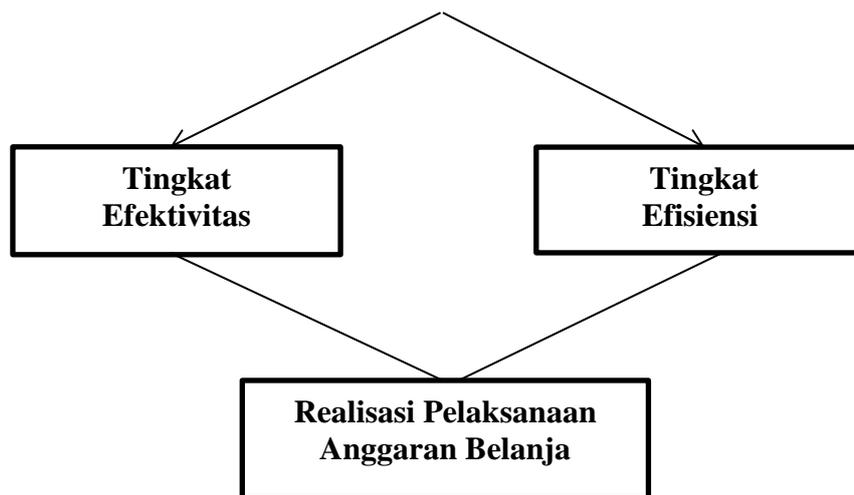
Anggaran dalam sektor publik harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.

Anggaran merupakan prakiraan dari penerimaan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu. Anggaran menggambarkan daftar belanja, akan tetapi anggaran dibatasi oleh pendapatan untuk menjaga keseimbangan dan mencegah pemborosan. Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang (perencanaan keuangan) untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi. Suatu anggaran harus terorganisasi secara rapi, jelas, rinci dan komprehensif. Proses penganggaran harus dilakukan secara jujur dan terbuka serta dilaporkan dalam suatu struktur yang mudah dipahami dan relevan dalam proses operasional dan pengendalian organisasi. Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi: aspek perencanaan, aspek pengendalian dan aspek akuntabilitas publik.

1.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian.





Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

II. Metode Penelitian

Metode data dilakukan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu metode penganalisaan data dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada kemudian diklasifikasikan, dianalisis selanjutnya diinterpretasikan sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti. Dalam hal ini analisis data akan dilakukan menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

A. Populasi

Menurut Sugiono (2013: 148) pengertian populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan katrakteristik yang ditetapkan oleh peneliti ini yang menjadi populasi adalah Laporan Keuangan Anggaran Belanja pada kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Kabupaten Bintan pada tahun 2016-2019.

B. Sampel

Menurut Sugiono (2013: 149) “sampel adalah bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan tahun 2016-2019 mengenai laporan realisasi anggaran belanja Bapelitbang Kabupaten Bintan.

C. Metode Analisis

1. Analisis Rasio Efektivitas

Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan (target) dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Hasil atau target yang diharapkan merupakan *outcome* sedangkan hasil yang dicapai merupakan output. Efektivitas membandingkan antara *outcome* dengan output suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dengan kata lain anggaran digunakan secara tepat (*spending wisely*) dalam (Mahmudi, 2018: 22).

Berikut formula untuk mengukur tingkat efektifitas pelaksanaan anggaran belanjam:

$$Efektifitas = \frac{Realisasi\ anggaran\ belanja}{Anggaran\ belanja} \times 100\%$$

Sumber : (Mahmudi, 2018: 22)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690. 900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Kriteria Efektifitas

Presentasi Pengukuran	Kriteria Efektifitas
100% Keatas 90%	Sangat Efektif
90% sampai 100%	Efektif
80% sampai 90%	Cukup Efektif
60 % sampai 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri Tahun 1996 No. 690.900.327. 2016

2. Analisis Rasio Efisiensi

Efisiensi merupakan hubungan antara output berupa barang atau jasa yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input. Konsep efisiensi hampir sama dengan produktivitas suatu organisasi program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output sebesar-besarnya. Efisiensi berarti pembelanjaan anggaran secara cermat (*spending well*) dalam (Mahmudi, 2018: 21).

Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran beianza:

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ anggaran\ belanja\ langsung}{Realisasi\ anggaran\ belanja} \times 100\%$$

Sumber : (Mahmudi, 2018: 21).

Keputusan Menleri Daiam Negeri Nomor 690. 900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas anggaran beianza dapat dilihat pada. Tabel 2.2

Tabel 2.2
Kriteria Efisiensi

Presentasi Pengukuran	Kriteria Efisiensi
100% keatas tidak efisien	Tidak efisien
90% sampai 100%	Kurang efisien
80% sampai 90%	Cukup efisien
60% sampai 80% n	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat efisien

Sumber: Kepmendagri Tahun 1996 No. 690.900.327,2016

Efisiensi merupakan salah satu bagian indikator kinerja *value for money* yang dapat diukur dengan ratio antara output dengan input. Karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama.
2. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar dari
3. pada proporsi peningkatan input.
4. Menurunkan input pada tingkat output yang sama.
5. Menurunkan input dalam proporsi penurunan output.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Pengukuran Efektivitas

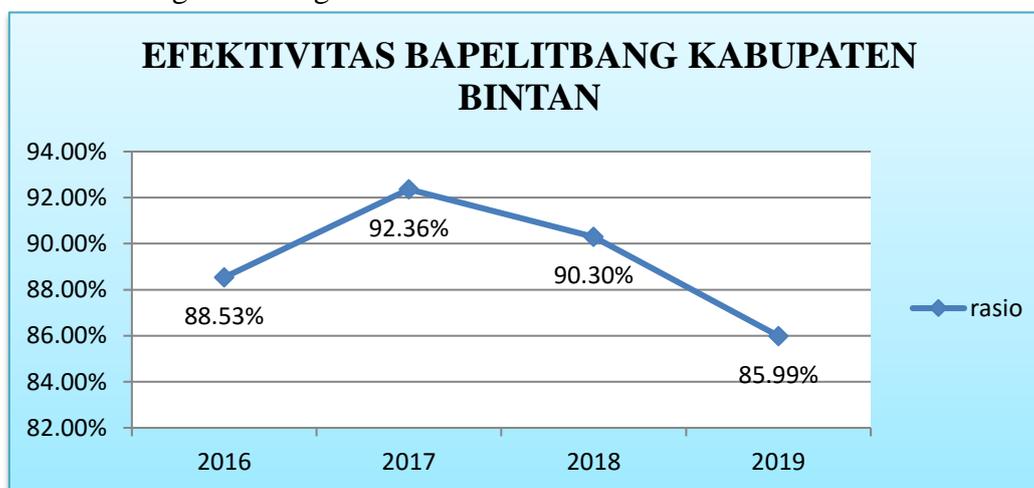
Efektivitas adalah kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dengan target yang ditetapkan. Kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif dengan beberapa nilai hasil perhitungan rasio. Jika rasio efektif $\geq 60\%$ maka dinilai tidak efektif, jika rasio efektif antara $60\%-80\%$ maka dinilai kurang efektif, jika rasio efektif antara $80\%-90\%$ maka dinilai cukup efektif, jika rasio efektif antara $90\%-100\%$ maka dinilai efektif, jika rasio efektif $> 100\%$ maka dinilai sangat efektif. Semakin besar rasio efektivitas berarti kinerja pemerintah semakin baik. Efektivitas dihitung dengan membandingkan antara realisasi dan anggaran belanja. Berikut ini perhitungan efektivitas:

Tabel 4.3
Efektivitas BAPELITBANG
Kabupaten Bintan Tahun 2016-2019

Tahun	realisasi anggaran belanja	anggaran belanja	Rasio	Kriteria
2016	8.645.068.559	9.764.822.825	88,53277	cukup efektif
2017	13.570.081.550	14.693.153.950	92,35649	Efektif
2018	16.992.982.878	18.817.823.700	90,30259	Efektif
2019	17.608.388.319	20.480.115.966	85,97797	cukup efektif

Sumber: BAPELITBANG Kabupaten Bintan (data yang diolah).

Dari tabel perhitungan efektivitas BAPELITBANG Kabupaten Bintan tahun 2016-2019 dapat di gambarkan melalui grafik sebagai berikut



Sumber: Diolah (2020)

Gambar 4.2
Grafik Efektivitas BAPELITBANG
Kabupaten Bintan Tahun 2016-2019

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas BAPELITBANG Kabupaten Bintan diatas dapat dilihat mengalami peningkatan untuk tahun 2016 ke tahun 2017, tetapi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan.

Pada tahun 2016, berdasarkan laporan realisasi anggaran jumlah anggaran belanja selama periode 2016 sebesar Rp 9.764.822.825.000,- sedangkan jumlah realisasi anggaran belanja Rp 8.645.068.559.000,-. Yang artinya anggaran belanja lebih besar dari realisasi anggaran belanja yang telah ditetapkan sehingga diperoleh nilai efektivitas BAPELITBANG Kabupaten Bintan per 31 Desember 2016 yang dihitung dengan rasio efektivitas sebesar 88,53% yang termasuk dalam katagori cukup efektif karena berada 80% - 90%.

Pada tahun 2017, berdasarkan laporan realisasi anggaran jumlah anggaran belanja selama periode 2017 sebesar Rp 14.693.153.950.000,- sedangkan jumlah realisasi anggaran belanja Rp 13.570.081.550.000,-. Yang artinya anggaran belanja lebih besar dari realisasi anggaran belanja yang telah ditetapkan sehingga diperoleh nilai efektivitas BAPELITBANG Kabupaten Bintan per 31 Desember 2017 yang dihitung dengan rasio efektivitas sebesar 92,36% yang termasuk dalam katagori efektif 90% - 100%.

Pada tahun 2018, berdasarkan laporan realisasi anggaran jumlah anggaran belanja selama periode 2018 sebesar Rp 18.817.823.700.000,- sedangkan jumlah realisasi anggaran belanja Rp 16.992.982.878.000,-. Yang artinya anggaran belanja lebih besar dari realisasi anggaran belanja yang telah ditetapkan sehingga diperoleh nilai efektivitas BAPELITBANG Kabupaten Bintan per 31 Desember 2018 yang dihitung dengan rasio efektivitas sebesar 90,30% yang termasuk dalam katagori efektif 90% - 100%.

Pada tahun 2019, berdasarkan laporan realisasi anggaran jumlah anggaran belanja selama periode 2019 sebesar Rp 20.480.115.966.000,- sedangkan jumlah realisasi anggaran belanja Rp 17.608.388.319.000,-. Yang artinya anggaran belanja lebih besar dari realisasi anggaran belanja yang telah ditetapkan sehingga diperoleh nilai efektivitas BAPELITBANG Kabupaten Bintan per 31 Desember 2019 yang dihitung dengan rasio efektivitas sebesar 90,30% yang termasuk dalam katagori cukup efektif karena berada 80% - 90%.

B. Pengukuran Efisiensi

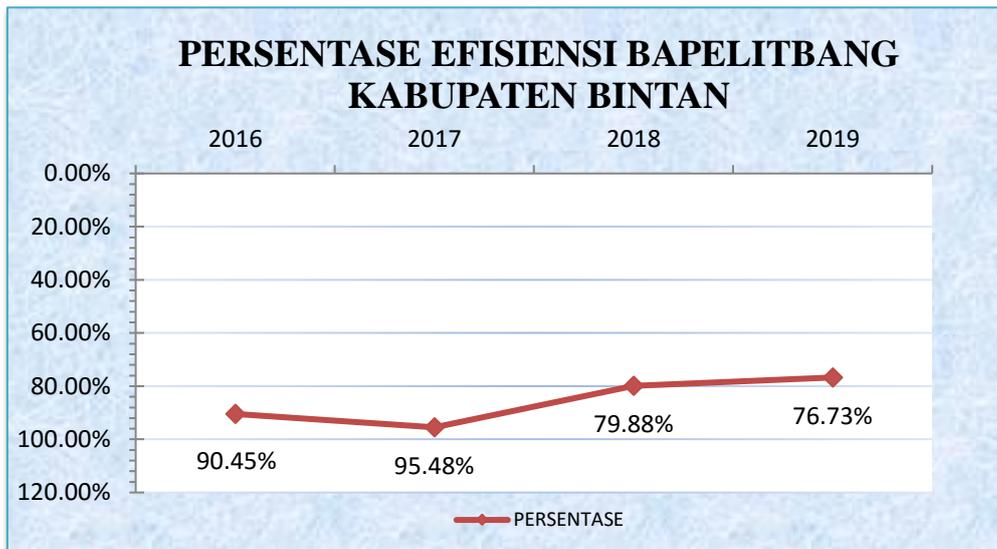
Pengukuran kinerja Bapelitbang Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan anggaran belanja langsung, tolak ukur yang digunakan adalah membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan anggaran belanja dikalikan 100%.

Tabel 4.4
Efisiensi BAPELITBANG
Kabupaten Bintan Tahun 2016-2019

tahun	realisasi angaran belanja langsung	realisasi anggaran belanja	Rasio	Kriteria
2016	7.819.945.130	8.645.068.559	90,45555945	kurang efisien
2017	12.955.500.000	13.570.081.550	95,47105485	kurang efisien
2018	13.573.437.700	16.992.982.878	79,87672204	Efisien
2019	13.511.194.000	17.608.388.319	76,73157676	Efisien

Sumber: BAPELITBANG Kabupaten Bintan (data yang diolah).

Dari tabel perhitungan efektivitas BAPELITBANG Kabupaten Bintan tahun 2016-2019 dapat di gambarkan melalui grafik sebagai berikut :



Sumber: Diolah (2020)

Gambar 4.3
Grafik Efisiensi BAPELITBANG
Kabupaten Bintan Tahun 2016-2019

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi BAPELITBANG Kabupaten Bintan diatas dapat dilihat jumlah realisasi anggaran belanja langsung dan realisasi anggaran belanja cenderung mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2016, berdasarkan laporan realisasi anggaran belanja dianggarkan selama periode 2016 sebesar Rp. 8.645.068.559.00,- dan dapat di realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7.819.945.130.00,- sehingga bisa diperoleh nilai efisiensi BAPELITBANG Kabupaten Bintan per 31 Desember 2016 sebesar 90,45% yang termasuk dalam katagori kurang efisien karna diatas 90%.

Pada tahun 2017, berdasarkan laporan realisasi anggaran belanja dianggarkan selama periode 2017 sebesar Rp. 13.570.081.550.00,- dan dapat di realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 12.955.500.000.00,- sehingga bisa diperoleh nilai efisiensi BAPELITBANG Kabupaten Bintan per 31 Desember 2017 sebesar 95,48% dan pada tahun ini tingkat efisiensi mengalami peningkatan sebesar 5.03% tetapi masih termasuk dalam katagori kurang efisien karna diatas 90%.

Pada tahun 2018, berdasarkan laporan realisasi anggaran belanja dianggarkan selama periode 2018 sebesar Rp. 16.992.982.878.00,- dan dapat di realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 13.573.437.700.00,- sehingga bisa diperoleh nilai efisiensi BAPELITBANG Kabupaten Bintan per 31 Desember 2018 sebesar 79,88% dan pada tahun ini tingkat efisiensi mengalami penurunan sebesar 15,6% yang termasuk dalam katagori efisien karna diatas 60% sampai 80%.

Pada tahun 2019, berdasarkan laporan realisasi anggaran belanja dianggarkan selama periode 2019 sebesar Rp. 17.608.388.319.00,- dan dapat di realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 13.511.194.000.00,- sehingga bisa diperoleh nilai efisiensi BAPELITBANG Kabupaten Bintan per 31 Desember 2019 sebesar 76,73% dan pada tahun ini tingkat efisiensi mengalami penurunan sebesar 3,15% akan tetapi masih termasuk dalam katagori efisien karna diatas 60% sampai 80%.

Dari tingkat efisiensi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa BAPELITBANG Kabupaten Bintan telah efisien dalam menggunakan dan mengelola anggaran belanja sehingga tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Bapelitbang Kabupaten Bintan sudah maksimal, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil perhitungan pelaksanaan anggaran belanja BAPELITBANG Kabupaten Bintan dapat dilihat dari rasio efektivitas mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Tingkatan efektivitas pada tahun 2016 yaitu sebesar 88,53% dan tingkat efektivitas yang paling tinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 92,36% lalu pada tahun 2018 yaitu sebesar 90,30% . Meskipun, pada tahun 2018 mengalami penurunan tetapi tingkat efektivitas masih efektif. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 85,99% sedangkan tingkat efektivitas cukup efektif. Kinerja keuangan dengan rasio efektifitas dapat dikatakan cukup efektif karena rata-rata efektifitasnya dibawah 90% yaitu sebesar 89,11% termasuk kriteria cukup efektif.
2. Berdasarkan hasil perhitungan pelaksanaan anggaran belanja BAPELITBANG Kabupaten Bintan dapat dilihat dari rasio efisiensi mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Tingkat efisiensi pada tahun 2016 yaitu sebesar 90,45% lalu pada tahun 2017 persentase efisiensi mengalami peningkatan yaitu menjadi 95,48% naik 5,03% tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 79,88% turun 15,6% dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 76,73% turun 3,15% dari tahun sebelumnya. Kinerja keuangan dengan rasio efisiensi dapat dikatakan cukup karena rata-rata efisiensi 84,24 termasuk kriteria cukup efisien karena diatas 80%.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo (2014). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ani Sri Rahayu, Pengantar Kebijakan Fiskal, (Jakarta: PT Bumi Aksara), h. 172.
- Ariel. (2013). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA* Vol. 1 No. 3, Hal. 74.81
- Hakim, Mochammad Faishal (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2016. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia.
- Jannah, R. (2019). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kebumen. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Khotimah, A. K. (2017). *Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014-2017*. 1–8.
- Mahmudi (2014). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- _____, (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta
- _____, (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. UII Press, Yogyakarta
- Mahsun, Mohammad (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 121.
- Nufus, K., Supratikta, H., & Muchtar, A. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Penghitungan Realisasi APBD Kabupaten Tangerang Selatan. *European Journal of Business and Management*, 9(3), 136–146.
- Nordiawan, Dedi, (2011). *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Paat, H. P., Nangoi, G. B., & Pusung, R. J. (2019). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon*. 7(3), 2979–2988.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun (2005) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Sedarmayanti (2012). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan (Bagian 1)*. Jakarta: Mandar Maju
- Siregar, Baldrice, (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi kedua. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif R & D (ke-23)*. Alfabeta, Bandung.
- Sumenge, A. S. (2013). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Minahasa Selatan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- _____, (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif*. Cetakan ke 19, penerbit Alfabeta, Cv Bandung.
- Ulum, Ihyaul MD (2012). *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waney, C.K., D.P.E. Saerang dan S.W. Alexander. (2018). Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concert* 13(2): 334-341.
- Wahab, La Ode Abdul. Rofingatun, Siti. Kreuta, Balthazar. (2015). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Jurnal Kedua Vol.2 No.3.
- Yunina, F., & Jumiati. (2018). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh Tengah*. 9(1), 1–12.